

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DAFTAR : 1644 / per-ump / 2013
TANGGAL : 16-2-2013

**ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN RETRIBUSI TERMINAL
DAN KONTRIBUSINYA DALAM USAHA MENINGKATKAN
RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



OLEH

**NAMA : RENIA AMELIA
NIM : 22 2008 063**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2012**



**ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN RETRIBUSI TERMINAL
DAN KONTRIBUSINYA DALAM USAHA MENINGKATKAN
RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH

NAMA : RENIA AMELIA

NIM : 22 2008 063

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2012**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Renia Amelia

Nim : 22 2008 063

Program study : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang,2012

Penulis



(Renia Amelia)

**Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul : ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN
RETRIBUSI TERMINAL DAN KONTRIBUSINYA
DALAM USAHA MENINGKATKAN RETRIBUSI
DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
PALEMBANG**

**Nama : Renia Amelia
NIM : 22 2008 063
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik**

**Diterima dan Disyahkan
Pada Tanggal.....**

Pembimbing



**Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN : 0206046303**

**Palembang, Maret 2012
a.n Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi**



**Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN : 0206046303**

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

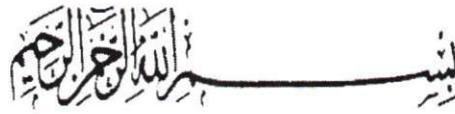
" Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, hingga kaum itu sendiri yang mengubah nasib mereka "

" Sungguh bersama kesukaran pasti ada kemudahan..Karena itu apabila selesai suatu tugas, mulailah tugas yang lain dengan sungguh-sungguh. Hanya kepada Tuhanmu hendaknya kau berharap "

" Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan, sebaik-baik keberanian adalah bersikap dan berkata jujur dalam soal haq, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan saksama sekalipun terhadap diri sendiri, mengendalikan amarah dan menepati janji dan sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan jangan ingkar betapapun situasi dan kondisinya "

Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

- ❖ Kedua Orang Tuaku tercinta*
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang*
- ❖ Teman-teman seperjuangan*
- ❖ Almamaterku*



PRAKATA

Penulisan skripsi ini adalah dimaksudkan untuk memenuhi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, dimana penulis memberikan judul “ Analisis Pengawasan Penerimaan Retribusi Terminal Dan Kontribusinya Dalam Usaha Meningkatkan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Palembang “.Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori yang berhubungan atau berkaitan dengan pembahasan skripsi.

Adapun dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis menyadari adanya kekurangan-kekurangan. Hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Berkat bantuan yang penulis terima, baik berupa petunjuk, bimbingan serta saran-saran dari berbagai pihak maka akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu penulis mengharapkan sekali pada semua pembaca agar sekiranya dapat memaklumi semua kekurangan dan kesalahan tersebut dan penulis akan menerima dengan senang hati, atas segala saran-saran yang diberikan oleh siapapun demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Ucapkan terima kasih penulis panjatkan kepda Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat yang telah

ditetapkan dalam mencapai gelar sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulis skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dorongan serta bimbingan dan doa sebagai pihak untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak H.M.Idris, SE.,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak M. Taufiq Syamsuddin SE.AK.,M.Si selaku Dekan fakultas ekonomi universitas muhammadiyah Palembang
3. Bapak DRS.Sunardi SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Welly, SE.,m.Si., selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Fahmi SE.,M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengajar diperguruan tinggi
6. Seluruh Dosen dan Asisten serta Staf Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Pimpinan beserta staf dan karyawan/karyawati Dinas Perhubungan Palembang

8. Teristimewa untuk Ayah dan Ibu, yang telah memberikan dorongan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Saudara-saudaraku tersayang, kakak rusli,kakak siali,ayuk ana,ayuk fitri,ayuk betti serta seluruh kakak ipar dan keponaka-keponakanku yang juga telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Semua teman dan sahabatku serta orang yang selalu dihati.

Akhir kata atas bantuan yang telah diberikan secara tulus dan ikhlas. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pahala yang berlipat ganda.

Palembang,.....2012

Penulis

(Renia Amelia)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PRAKARTA.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6

BAB 11 KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya.....	8
B. Landasan Teori.....	10
1. Pengawasan.....	10
2. Pengertian Retribusi Daerah	18
3. Jenis-jenis Retribusi Daerah	19
4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah.....	23
5. Pengertian Retribusi Terminal	24

6. Tarif Retribusi Terminal	25
7. Prosedur Pengawasan Retribusi Terminal	25
8. Pengertian Kontribusi	26

BABA III METODEDELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	28
B. Tempat Penelitian	29
C. Operasionalisasi Variabel	29
D. Data yang Digunakan.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	31

BAB IV PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	33
1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang	33
2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	34
3. Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	35
4. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas	36
B. Pembahasan	50
1. Pengawasan Penerimaan Retribusi Terminal.....	51
2. Upaya-upaya yang dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah	55

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	59
B. Saran	60

LAMPIRAN DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	4
Tabel I.2	4
Tabel I.3	5
Tabel II.1	25
Tabel III.1	29



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1	26
Gambar IV.1	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 Sertifikat AIK

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian

Lampiran 4 Sertifikat Toefl

Lampiran 5 Biodata

ABSTRAK

Renia Amelia / 22 2008 063/2012/ Analisis Pengawasan Penerimaan Retribusi Terminal dan Kontribusinya Dalam Usaha Meningkatkan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Palembang / Akuntansi Sektor Publik

Rumusan masalah dalam penelitian adalah a. apakah pengawasan penerimaan retribusi terminal sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang benar? b. upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi terminal? a. tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pengawasan penerimaan retribusi terminal sudah dilaksanakan sesuai tahapan yang benar. b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan retribusi terminal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan tempat penelitian ini adalah Dinas Perhubungan kota Palembang yang beralamat di jalan Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Palembang. Variabel dalam penelitian ini adalah pengawasan penerimaan retribusi terminal dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis didapat kesimpulan sebagai berikut: a. pengawasan penerimaan retribusi terminal yang dilaksanakan dinas perhubungan kota Palembang melalui 5 indikator yaitu: penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan serta pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. b. upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan retribusi terminal. Di dalam meningkatkan pendapatan retribusi daerah, dinas perhubungan kota Palembang lebih mengutamakan kinerja para petugas yang bersangkutan untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah. Untuk melakukan pelaksanaan pemungutan pelayanan yang lebih baik agar para wajib retribusi merasakan kepuasan. Dalam meningkatkan pendapatan retribusi terminal dinas perhubungan kota Palembang melakukan penelitian mengenai sumber-sumber yang ada, yang dapat dijadikan bahan untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah.

Kata kunci: pengawasan penerimaan , retribusi terminal dan retribusi daerah.

ABSTRACT

Renia Amelia / 22 2008 063/2012 / The Analysis of The Supervision of Terminal Retribution Receipt and Its Contribution in Increasing Local Retribution at Transportation Department in Palembang/ Accounting Public Sector

The problems of this study were the supervision of terminal retribution receipt had been implemented in proper steps and what efforts had been taken by the government in increasing local retribution receipt. The purposes of this study were to find out whether the supervision of terminal retribution receipt had been implemented in proper steps and to find out the efforts had been taken by the government in increasing local retribution receipt.

This study was descriptive method. It was conducted at Transportation Department on Street Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Palembang. The variables of this study were the supervision of terminal retribution receipt and government's efforts in increasing local retribution receipt.. The data of this study used the primary data. The technique of collecting the data were interviews and documentation. The technique of analyzing the data were qualitative analysis methods.

The result of this study showed that the supervision of terminal retribution receipt at Transportation Department in Palembang were done in five indicators. They were setting standards, determining the measurement of implementation activity, measurement of the implementation activity, comparing the the standard implementaion and deflecting analysis, and taking correction action needed. The government's efforts in increasing local retribution receipt focussed on officials' performance in giving better service to satisfy the retribution payers. In increasing terminal retribution receipt the Transportation Department in Palembang conducted some researches about existing resources which could be used as considerration in increasing the local retribution income.

Keywords: The Receipt Supervision, Terminal Retribution, Local Retribution.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan kegiatan pembangunan di daerah serta pengadaan pelayanan publik ini membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, diperlukan sumber- sumber pembiayaan pembangunan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebutkan sumber- sumber daerah tersebut adalah : 1) Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah atau Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 menurut daerah untuk berupaya meningkatkan sumber yang berasal dari PAD. Pelaksanaan pembangunan secara mandiri dapat terlaksana apabila kontribusi dari PAD lebih besar dari pada sumber-sumber lainnya, oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan PAD, upaya meningkatkan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efektifitas pemungutan melalui pengoptimalan potensi yang ada dan terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya.

Retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ikut berperan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi serta bertanggung jawab. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara professional dan bertanggungjawab karena wewenang pemungutan, pengelolaan dan penggunaan dana retribusi sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Pengawasan merupakan suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang system informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan, untuk menetapkan apakah terjadi pertimbangan dan pengukur penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbuatan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah dipergunakan seefektif mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.

Pengawasan perlu dilakukan untuk membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan perlu dilakukan pada setiap tahap agar dapat diadakan perbaikan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pelaksanaan pengawasan dapat mengoreksi tindakan yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut.

Jenis-jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi

terminal merupakan salah satu (retribusi jasa usaha daerah) yang memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pemerintah daerah terutama kota Palembang.

Dinas perhubungan merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan retribusi terminal. Dinas Perhubungan merupakan dinas yang mengelola retribusi terminal dan berusaha untuk meningkatkan pendapatan agar target yang diinginkan dapat tercapai. Dinas Perhubungan Kota Palembang memastikan bahwa retribusi yang dipungut masuk ke kas daerah sehingga segala bentuk penyelewengan, penyimpangan dan penyalahgunaan dapat dihilangkan.

Dalam pelaksanaan pengawasan penerimaan retribusi terminal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah pengawasan tidak langsung atau kontrol hasil yang dilakukan dari luar bukan secara langsung, tetapi melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh bawahannya, laporan ini berbentuk laporan tulisan dan lisan. Agar pengawasan menjadi efektif serta mengkomunikasikan seperti yang diharapkan, maka Dinas Perhubungan Kota Palembang harus selalu menyesuaikan kebutuhannya yang dalam perhitungan kemungkinan, nilai dan kemampuan masing-masing individu yang harus diawasi. Ini berarti memang seharusnya pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang harus turun ke lapangan (terminal-terminal) sehingga kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyelewengan dapat diminimalisir.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal dalam Kota Palembang pasal 2 menyatakan dengan nama retribusi terminal dipungut atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di bidang pelayanan terminal.

Berikut ini dapat dilihat nama dan tipe terminal yang ada di Kota Palembang.

Tabel I.1
Data Terminal di Kota Palembang

No	Nama Terminal	Tipe	Luas	Instansi Pengelola
1.	Alang- alang Lebar	A	8.000	Dinas Perhubungan Palembang
2.	Karya Jaya	A	18.000	Dinas Perhubungan Palembang
3.	Jaka Baring	B	8.000	Dinas Perhubungan Palembang
4.	Plaju	B	3.750	Dinas Perhubungan Palembang
5.	Sako Kenten	C	2.400	Dinas Perhubungan Palembang
6.	Lemabang	C	1.600	Dinas Perhubungan Palembang
7.	Km . 5	C	1.800	Dinas Perhubungan Palembang
8.	7 ulu	C	820	Dinas Perhubungan Palembang
9.	Tangga Buntung	C	780	Dinas Perhubungan Palembang

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang,2011

Tabel berikut ini merupakan gambaran target dan realisasi penerimaan Retribusi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010.

Tabel I.2
Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Tahun 2006-2010

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2006	Rp. 61.041.972.527	Rp. 40.375.914.272	66,14%
2007	Rp. 55.999.049.227	Rp. 48.572.128.218	86,73%
2008	Rp. 63.332.753.137	Rp. 59.055.021.400	93,24%
2009	Rp. 64.629.000.000	Rp. 51.274.328.286	79,33%
2010	Rp. 74.393.402.273	Rp. 65.175.505.023	87,60%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2011

Berdasarkan Tabel I.2 tersebut, dapat dilihat bahwa persentase realisasi penerimaan retribusi daerah selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 selalu tidak tercapai.

Tabel berikut ini merupakan gambar target dan realisasi penerimaan Retribusi Kumulatif Terminal Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010.

Table I.3
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal
Tahun 2006-2010

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2006	Rp. 2.000.000.000	Rp. 1.405.754.200	70,29%
2007	Rp. 2.000.000.000	Rp. 1.214.690.850	60,73%
2008	Rp. 2.250.000.000	Rp. 1.239.446.700	55,09%
2009	Rp. 2.500.000.000	Rp. 1.379.046.450	55,16%
2010	Rp. 2.500.000.000	Rp. 1.413.272.750	56,53%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang,2011

Berdasarkan tabel I.3 tersebut dapat dilihat bahwa persentase realisasi penerimaan retribusi terminal selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 selalu tidak tercapai. Dimana persentase realisasi penerimaan retribusi terminal untuk tahun 2006 adalah sebesar 70, 29% kemudian turun menjadi 60, 73% pada tahun 2007, sedangkan realisasi penerimaan retribusi terminal untuk tahun 2008 kembali mengalami penurunan menjadi 55, 09%, penurunan realisasi penerimaan tersebut terjadi karena beberapa faktor antara lain, banyaknya angkutan kota, AKDP dan AKAP yang tidak masuk kedalam terminal dan petugas yang menjaga masih lengah dalam mengawasi mobil-mobil yang menurunkan dan menaikkan penumpang diluar terminal,serta banyak terdapat sarana dan prasarana yang

belum sepenuhnya dimanfaatkan di terminal, sehingga hal tersebut dapat mengurangi tingkat pencapaian target. Dan pada tahun 2009 dengan realisasi penerimaan retribusi terminal sebesar 55,16% dan selanjutnya pada tahun 2010 realisasi penerimaan retribusi terminal mengalami peningkatan menjadi sebesar 56,53%. Mengingat besarnya peranan dan kontribusi retribusi khususnya retribusi terminal dan diperlukan sebuah sistem pengawasan yang baik dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi daerah, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Analisis Pengawasan Penerimaan Retribusi Terminal dan Kontribusinya Dalam Usaha Meningkatkan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengawasan penerimaan retribusi terminal sudah dilaksanakan sesuai tahapan yang benar?
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi terminal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan penerimaan retribusi terminal sudah dilaksanakan sesuai tahapan yang benar.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan retribusi terminal .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan atau pengetahuan khususnya mengenai masalah pengawasan penerimaan retribusi terminal dan kontribusinya dalam usaha meningkatkan retribusi daerah.

2. Bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang

Memberikan kontribusi, masukan dan bahan pemikiran mengenai pemecahan masalah tentang pengawasan penerimaan retribusi terminal sehingga dapat meningkatkan retribusi daerah

3. Bagi Almamater

Bagi mereka yang ingin meneliti maka hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dan perbandingan dalam mendapatkan hasil yang lebih baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Analisis Pelaksanaan Prosedur Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palembang yang telah dilakukan oleh Elis Sulistiawati (2006). Perumusan masalah dalam penelitian ini ada dua, yang pertama yaitu apakah prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi ke bendaharawan khusus penerimaan di beberapa puskesmas kota Palembang telah sesuai dengan ketetapan Menteri Dalam Negeri No. 234-244 Tahun 2003, sedangkan yang kedua yaitu apakah prosedur pencatatan dan pertanggung jawaban retribusi ke bendaharawan khusus penerimaan di beberapa puskesmas kota Palembang telah sesuai dengan ketetapan Menteri Dalam Negeri No. 234-244 Tahun 2003. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi ke bendaharawan khusus penerimaan di beberapa puskesmas kota Palembang telah sesuai dengan ketetapan Menteri Dalam No. 234-244 Tahun 2003 dan untuk mengetahui kesesuaian prosedur pencatatan dan pertanggungjawaban retribusi ke bendaharawan khusus penerimaan di beberapa puskesmas kota Palembang telah sesuai dengan ketetapan Menteri Dalam Negeri No. 234-244 Tahun 2003.



Operasionalisasi variabel yang digunakan adalah pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi pelayanan kesehatan ke bendaharawan khusus penerima di beberapa puskesmas kota Palembang belum berjalan dengan baik karena di beberapa puskesmas masih ada yang menggunakan karcis sebagai bukti pembayaran dan penyetoran hasil pungutan ada yang tidak setiap hari dan prosedur pencatatan dan pertanggungjawaban yang kurang terkoordinasi. Selain itu target dan realisasi pada tiap puskesmas di kota Palembang tahun 2004-2005 ada yang mengalami kenaikan dan mengalami penurunan, ini disebabkan karena kurangnya tingkat pelayanan yang diberikan.

Perbandingan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilakukan dengan melihat persamaan dan perbedaan keduanya. Dilihat dari persamaan yaitu sama-sama meneliti retribusi, sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang pelaksanaan prosedur pengelolaan retribusi pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Palembang sedangkan penelitian ini meneliti pengawasan penerimaan retribusi terminal dan kontribusinya dalam usaha meningkatkan retribusi daerah pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

B. Landasan Teori

1. Pengawasan

a) Pengertian Pengawasan

Menurut Revrisond (2000:118) menyatakan bahwa pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan.

Menurut Heidrachman dan Suad (2000:7), pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan atau kalau perlu menyelesaikan kembali rencana yang telah dibuat, dengan demikian pengawasan menyangkut masalah pengaturan berbagai kegiatan sesuai dasar analisis dari tujuan organisasi yang fundamental.

b) Manfaat Pengawasan

T Hani (2000:366) menyatakan bahwa faktor-faktor pentingnya pengawasan dilakukan antara lain adalah :

1) Perubahan lingkungan organisasi

Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi secara terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, diketemukannya bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

2) Peningkatan kompleksitas organisasi

Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati.

3) Kesalahan-kesalahan.

Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan, tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan-kesalahan. System pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.

4) Kebutuhan manajer untuk mendelagasikan wewenang.

Bila manajer mendelagasikan wewenang kepada bawahannya, tanggungjawaban atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan system pengawasan.

c) Bentuk-bentuk Pengawasan

Untuk meningkatkan efektivitas kerja perlu dilakukan pengawasan baik itu intern maupun ekstern, guna menghindari pemborosan dan kesalahan-kesalahan lainnya, Yayat M (2001:234-247), menyatakan bahwa bentuk-bentuk pengawasan terdiri dari:

- a. Berdasarkan asalnya, pengawasan dibagi menjadi dua yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern
- 1) Pengawasan intern adalah alat pengawasn dari pimpinan organisasi yang bersangkutan untuk mengawasi apakah kegiatan-kegiatan bawahannya telah sesuai dengan rencana dan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan.
 - 2) Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh alat pengawasan oleh masyarakat atau organisasi lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap pelaksanaan kegiatan dari organisasi yang diawasinya.
- b. Berdasarkan waktunya pengawasan dibagi menjadi dua yaitu pengawasn preventif dan pengawasan represif.
- 1) Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dilaksanakan untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.
 - 2) Pengawasan refresif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilaksanakan dengan cara membandingkan dengan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi.
- c. Berdasarkan buktinya, pengawasan dibagi menjadi pengawasan dari dekat dan pengawasan dari jauh.
- 1) Pengawasan dari dekat adalah pengawasan yang dilakukan ditempat kejadian atau di tempat penyelenggaraan transaksi/administrasi. Pengawasan dari dekat dilakukan dengan cara pemeriksaan langsung

terhadap administrasinya termasuk penilaian pelaksanaan administrasi sebagai bukti dan alat kelengkapan surat pertanggungjawaban yang dikirim.

- 2) Pengawasan dari jauh adalah pengawasan yang dilaksanakannya dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukungnya mengenai penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan.

d. Berdasarkan keabsahannya, pengawasan dibagi menjadi pengawasan/pemeriksaan kebenaran menurut hak dan pengawasan/pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran.

- 1) Pengawasan menurut hak dilakukan terhadap transaksi-transaksi yang mengakibatkan pembayaran atau tagihan-tagihan kepada Negara dengan melakukan penelitian terhadap bukti-bukti pendukungnya.
- 2) Pengawasan/pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengeluaran-pengeluaran yang dilaksanakan telah memenuhi prinsip-prinsip efektif dan efisien sehingga pengeluaran yang bersifat pemborosan dapat dihindari.

d) Tahap-tahap Pengawasan

T. Hani (2000:362) menyatakan untuk melakukan proses pengawasan yang efektif biasanya melalui 5 tahap atau langkah sebagai berikut :

1) Penetapan standar

Standar mengandung arti sebagai satu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil-hasil.

2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

3) Pengukuran Pelaksana Kegiatan

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan pengukuran pelaksanaan dilakukan berbagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus.

4) Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan.

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang telah direncanakan atau standar yang telah ditetapkan.

5) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai macam bentuk. Standar mungkin di ubah, pelaksanaan diperbaiki atau keduanya dilakukan bersamaan.

e) Prinsip-prinsip Pengawasan

Agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan apa yang diharapkan, perlu adanya prinsip-prinsip dasar pengawasan.

Menurut Malayu (2001:243) prinsip-prinsip dasar pengawasan adalah sebagai berikut:

1) Prinsip pencapaian tujuan

Yaitu dengan mengadakan koreksi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari perencanaan.

2) Prinsip efisiensi pengawasan

Adalah bagaimana dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan dari pada perencanaan, sehingga tidak timbul hal-hal diluar dugaan yang mengganggu jalannya perusahaan.

3) Prinsip tanggung jawab

Adalah pengawasan hanya dapat terlaksana apabila manajer bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan pengawasan.

4) Prinsip pengawasan terhadap masa yang akan datang

Adalah pengawasan yang efektif harus ditunjukkan pada pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

5) Prinsip pengawasan langsung

Adalah teknik perencanaan yang paling efektif ialah mengusahakan manajer bawahan yang berkualitas baik. Pengawasan itu dilakukan oleh manajer atas dasar suka berbuat salah. Cara yang paling baik untuk menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan adalah mengusahakan seoptimal mungkin para petugas yang memiliki kualitas yang baik.

6) Prinsip refleksi perencanaan

Adalah perencanaan harus disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan dari perencanaan sehingga tidak menyimpang dari pada tujuan yang telah ditetapkan.

7) Prinsip kebutuhan pengawasan

Adalah pengawasan yang harus sesuai dengan kebutuhan manajer. Teknik pengawasan harus ditunjukkan terhadap kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibutuhkan berbeda dimana antara satu dengan yang lain tergantung pada tugas dan tingkat para manajer.

f) Pengawasan Melekat

Menurut Revrisond (2000:126), pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Revrizond (2000:133-134), sesuai dengan intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989, tujuan pengawasan melekat adalah terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan, kebijakan, rencana dan perundang-undangan yang berlaku oleh atasan.

Sedangka sasaran pengawasan melekat adalah:

- 1) Meningkatkan disiplin, prestasi kerja dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas.
- 2) Menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang.
- 3) Menekan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan negara/daerah dan segala bentuk pungutan liar.
- 4) Mempercepat penyelesaian perizinan dan peningkatan pelayanan masyarakat.
- 5) Mempercepat urusan kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengertian Retribusi Daerah

Indra dan Gatot (2003:90) menyatakan bahwa retribusi Daerah merupakan panutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat.

Menurut Abdul (2002:86-94) macam-macam Retribusi Daerah adalah:

- a. Retribusi yang dikenakan pada jasa umum seperti pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan dan persampahan, penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, pelayanan pasar, pelayanan air bersih, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta yang dibuat oleh pemerintah daerah dan pengujian kapal perikanan.
- b. Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha seperti pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan pertokoan, pelayanan terminal, pelayanan tempat khusus pakir, pelayanan tempat penitipan anak, penginapan, penyedotan kakus, rumah potong hewan, tempat pendaratan kapal, tempat rekreasi dan olah raga, penyeberangan diatas air, pengelolaan air limbah, penjualan usaha produksi daerah.
- c. Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu seperti izin peruntukan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gagngguan, izin trayek, izin pengambilan hasil hutan.

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa :

- 1) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- 2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- 3) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah yang bersangkutan.

3. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis retribusi daerah pada pasal 18.

a. Retribusi Jasa Umum

Jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.

c. Retribusi Perizinan Daerah

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1) Retribusi jasa umum

- a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan manfaat umum.
- d) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi.
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum meliputi :

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan sampah
3. Retribusi pengganti biaya cetak KTP dan akte catatan sipil
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
5. Retribusi pakir tepi jalan umum
6. Retribusi pasar
7. Retribusi air bersih
8. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
9. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
10. Retribusi pengganti biaya cetak peta
11. Retribusi pengujian kapal perikanan

2) Retribusi Jasa Usaha

- a) Retribusi jasa usaha bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersil yang seyogyanya disediakan oleh oleh sector swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki dan dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 2. Retribusi pasar grosir atau pertokoan
 3. Retribusi terminal
 4. Retribusi tempat khusus parkir
 5. Retribusi tempat penitipan anak
 6. Retribusi tempat penginapan/villa
 7. Retribusi tempat penyedotan kakus
 8. Retribusi rumah potong hewan
 9. Retribusi tempat pendaratan kapal
 10. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
 11. Retribusi penyebrangan diatas air
 12. Retribusi pengelolaan limbah air
 13. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu
- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka azas desentralisasi.
 - b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
 - c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya yang menanggulangi dampak negative dan pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu

1. Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah
2. Retribusi izin mendirikan bangunan
3. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
4. Retribusi izin gangguan
5. Retribusi izin trayek
6. Retribusi izin pengambilan hutan

4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Retribusi daerah

Menurut Kunarjo (2004:178) untuk mengatasi rendahnya target penerimaan retribusi daerah pada umumnya pemerintah dapat melakukan dua pendekatan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pendekatan intensifikasi yang harus dilakukan adalah:

- a. Kemampuan sumber daya harus ditingkatkan
- b. Koordinasi antar karyawan dan instansi terkait dikembangkan
- c. Kualitas pelayanan harus diperbaiki

Sedangkan usaha ekstensifikasi yaitu sebagai berikut:

- a. Penggalan sumber-sumber baru
- b. Pembuatan peraturan-peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan.

5. Pengertian Retribusi Terminal

Menurut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Pasal 2 dengan nama retribusi terminal dipungut atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah dibidang pelayanan terminal.

Objek pelayanan terminal adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dibidang terminal, sedangkan subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan terminal. Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan terminal.

Kesimpulan dari pengertian retribusi terminal adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan fasilitas terminal. Objek retribusi terminal adalah pelayanan yang disediakan, sedangkan subjek retribusi terminal adalah pengguna pelayanan terminal.

6. Tarif Retribusi Terminal

Menurut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Pasal 9 tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhitung.



Besarnya tarif terminal ditetapkan di Kota Palembang adalah sebagai berikut.

Tabel II.1
Tarif Retribusi Terminal Berdasarkan Golongan

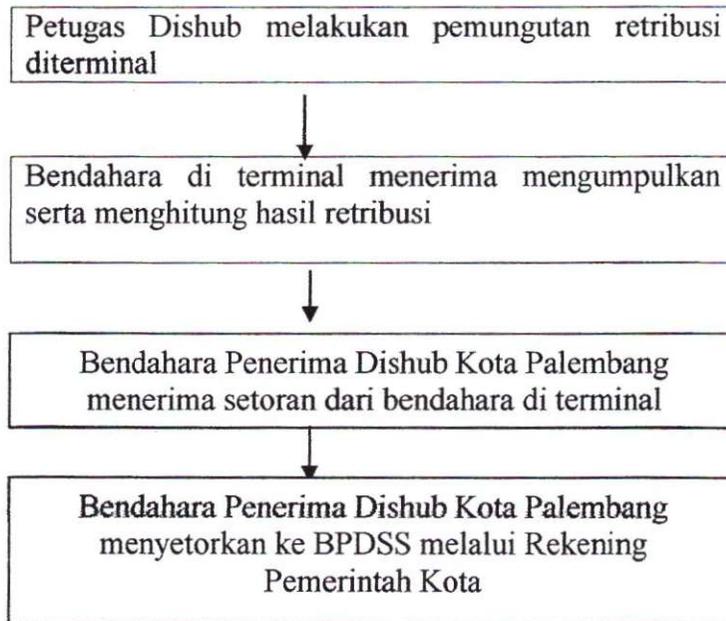
A	Angkutan kota	Tarif
	1. Otolet dan Bus Kecil	Rp. 500,-
	2. Bus Kota	Rp. 1.000,-
B	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi(AKDP)	
	1. Bus Kecil	Rp. 2.000,-
	2. Bus Sedang	Rp. 3.000,-
	3. Bus Besar	Rp. 6.000,-
C	Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	
	1. Bus Kecil	Rp. 5.000,-
	2. Bus Sedang	Rp. 7.500,-
	3. Bus Sedang	Rp. 10.000,-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang

7. Prosedur Pengawasan Retribusi Terminal

Prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi terminal Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Gambar II.1
Prosedur Pemungutan Dan Penyetoran Retribusi Terminal
Dinas Perhubungan Kota Palembang



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2011

8. Pengertian Kontribusi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2002:282) menyatakan bahwa pengertian kontribusi adalah iuran yang disumbangkan sebagai persentase dari penerimaan pendapatan, maka yang dimaksud kontribusi pajak daerah adalah sumbangan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan pajak daerah.

Menurut Abdul (2002:155-156), untuk mengukur kontribusi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$KX = \frac{\text{Realisasi RT}}{\text{Realisasi RD}} \times 100\%$$

K_x = Kontribusi

R_{RT} = Realisasi Retribusi Terminal

R_{RD} = Realisasi Retribusi Daerah

Kesimpulan dari pengertian kontribusi adalah iuran yang disumbangkan sebagai persentase dari penerimaan pendapatan sedangkan kontribusi pajak daerah adalah sumbangan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan pajak daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:53-55), jenis penelitian menurut tingkat eksplanasinya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian deskriptif

Adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian komparatif

Adalah penelitian yang bersifat membandingkan pada penelitian ini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian asosiatif(hubungan)

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif.

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan berdasarkan tingkat eksplanasinya yaitu jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengawasan penerimaan retribusi terminal dan usaha meningkatkan retribusi daerah.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang yang beralamat di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Tabel III.1
Operasioanalisis Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pengawasan penerimaan Retribusi Terminal	Segala kegiatan yang menjamin agar pengumpulan penerimaan retribusi pelayanan terminal tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan.	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan standar - Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan - Pengukuran pelaksanaan kegiatan - Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan - Koreksi bila diperlukan
Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang	Untuk mengatasi rendahnya target penerimaan retribusi daerah pada umumnya pemerintah dapat menggunakan dua pendekatan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan sumber daya harus ditingkatkan - Koordinasi antar karyawan dan instansi terkait dikembangkan - Kualitas pelayanan harus diperbaiki - Penggalan sumber-sumber baru - Pembuatan peraturan-peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan.

Sumber : penulis, 2011

D. Data yang Diperlukan

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:146) menyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Yaitu sumber penelitian yang diperoleh penelitian secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)

2. Data Sekunder

Yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer, data primer dalam penelitian ini berupa sejarah singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang, struktur organisasi dan pembagian tugas, penerimaan tugas, penerimaan retribusi terminal serta Penerimaan Retribusi Daerah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin W. Gulo (2002:115-123) menyatakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Pengamatan (observasi)

Yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan

2. Survei

Yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument pertanyaan untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel.

3. Wawancara

Yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden

4. Kuesioner (angket)

Yaitu melalui media, atau daftar pertanyaan yang dikirim secara langsung pada responden

5. Dokumen

Adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dimana wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang berwenang atau orang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sedangkan dokumentasi yaitu berupa data-data, sejarah singkat, struktur dan pembagian tugas serta aktivitas perusahaan.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:146) menyatakan bahwa analisis data terdiri dari :

1. Analisis Kualitatif

Yaitu analisis yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat merupakan jawaban dari suatu peristiwa yang sulit diukur.

2. Analisis Kuantitatif

Yaitu yang dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat dihitung dengan rumus statistik.

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis dan menjelaskan bagaimana pengawasan penerimaan retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan target penerimaan retribusi di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang

Dibentuknya Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak serta merta di ikuti perubahan internasional, melainkan tahap-tahap instansional yaiknii berawal dari terbentuknya Dinas LLAJ Palembang I berubah menjadi LLAJR Wilayah I, berubah lagi menjadi Dinas I LLAJR kota Palembang.

Setelah berlakunya undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah dibidang lalu lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Untuk kelancaran teknis administrassi, setelah dikeluarkannya peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas LLAJ Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, pada tanggal 26 Maret 1996 cabang Dinas I LLAJ Tingkat 11 kotamadya Palembang oleh Walikota Palembang (Bapak Drs. H. Husni) berubah menjadi Dinas LLAJ kotamadya Tingkat II Palembang yang keberadaannya dibawah Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Palembang.



Dan berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, berubah istilah menjadi Dinas LLAJ Kota Palembang dan pada bulan Mei Tahun 2001 menjadi Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang.

Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang lalu lintas, angkutan jalan, serta tugas yang lain diberikan oleh pemerintah daerah provinsi untuk tugas tersebut Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumatra Selatan.
- b. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri Perhubungan.
- c. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Palembang.

2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang

Visi:

Terhujudnya pelayanan perhubungan yang berkualitas dalam rangka menuju Palembang Kota Internasional.

Misi:

- a. Meningkatkan pelayanan jasa perhubungan yang lebih berkualitas
- b. Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyedia dan pengguna jasa perhubungan di Kota Palembang.

3. Kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang**a. Kewenangan**

Pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, penyelenggaraan perpakiran kendaraan bermotor, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan, perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, bimbingan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang angkutan laut (jasa), sungai dan penyebrangan (ASDP), dan kereta api serta dibidang perhubungan udara dan postel.

b. Tugas pokok

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan
- 2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan dibidang perhubungan
- 3) Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas perhubungan pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas perhubungan dan cabang dinas perhubungan

c. Fungsi

- 1) Merumuskan kebijakan teknis dibidang perhubungan yang sifatnya mendukung secara operasional kebijakan pemerintah kota Palembang

- 2) Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Melaksnakan pembinaan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)
- 4) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada walikota tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya (perhubungan)
- 5) Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur pemda dan instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas kelompok

4) Struktur organisasi dan Pembagian Tugas

a. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang

Struktur organisasi menggambarkan susunan kerja yang disertai dengan pembagian tugas atau pelimpahan wewenang serta tanggungjawab secara formal dalam setiap fungsi organisasi. Struktur organisasi melukiskan interaksi kegiatan, peranan, hubungan, tujuan dan sifat-sifat organisasi lainnya, tetapi perlu diingat pula bahwa peranan struktur pada setiap jenis organisasi ternyata berlainan dalam tingkat dan kualitasnya. Suatu struktur organisasi menunjukkan tugas dan wewenang atau tanggung jawab dari masing-masing pegawai agar tidak saling tumpang tindih.

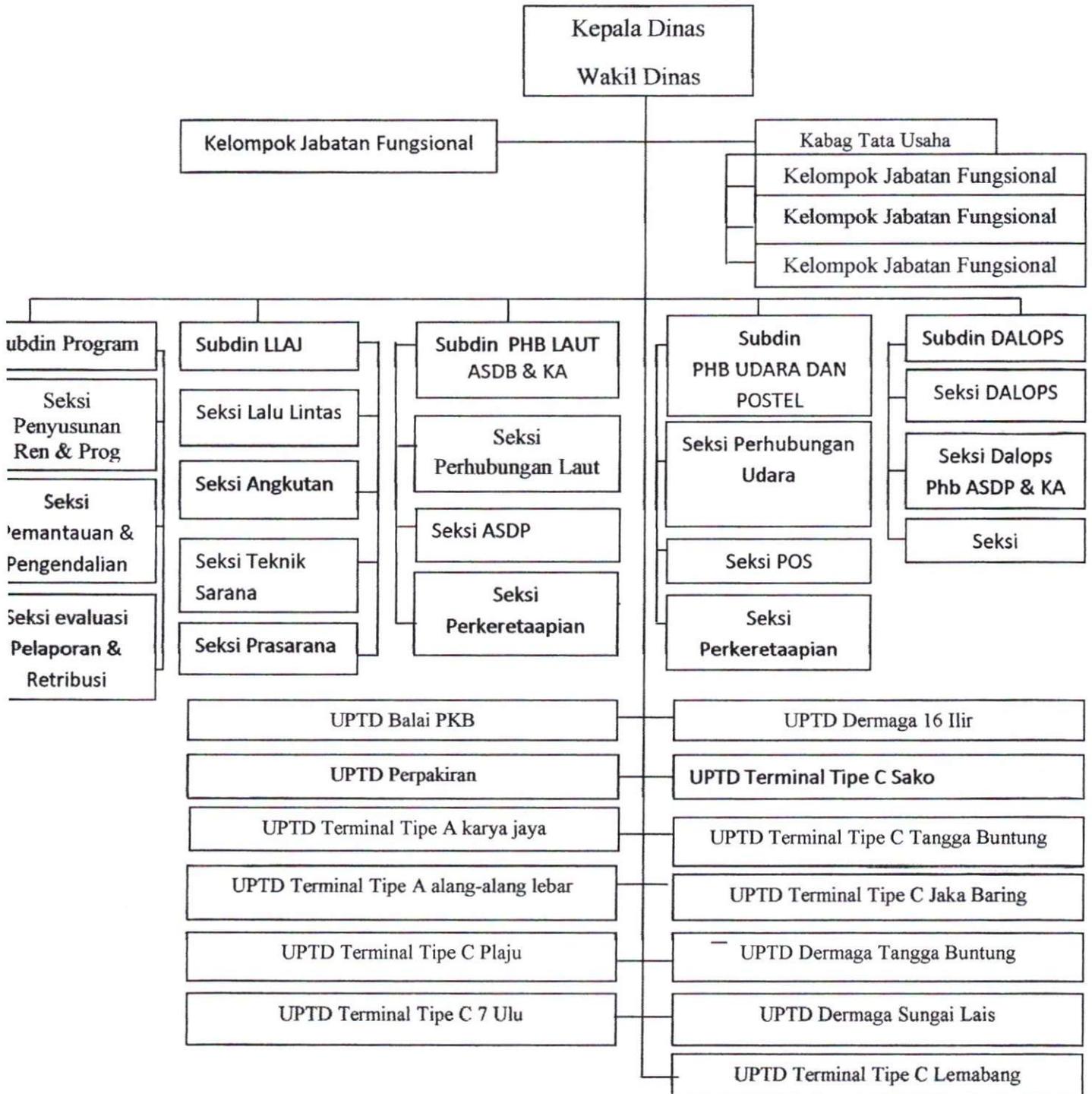
Secara umum struktur organisasi yang digunakan dalam organisasi pemerintah adalah struktur organisasi garis atau lini yang merupakan tipe organisasi yang tertua dan paling penting sederhana. Pada struktur organisasi ini wewenang puncak pimpinan mengatur bagian-bagian yang ada dibawahnya secara langsung, sehingga dapat mempermudah tujuan organisasi.

Adapun pola struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala dinas
- 2) Wakil kepala dinas
- 3) Bagian tata usaha
 - a. Sub bagian umum
 - b. Sub bagian kepegawaian
 - c. Sub bagian keuangan
- 4) Sub Dinas Program terdiri dari:
 - a. Seksi penyusunan rencana dan program
 - b. Seksi pemantauan dan pengendalian
 - c. Seksi evaluasi, pelaporan dan retribusi
- 5) Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari:
 - a. Seksi lalu lintas
 - b. Seksi angkutan
 - c. Seksi teknik sarana
 - d. Seksi prasarana
- 6) Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, danau dan Penyebrangan (ASDP) dan kereta api terdiri dari:
 - a. Seksi perhubungan laut
 - b. Seksi angkutan sungai, dan penyebrangan (ASDP)
 - c. Seksi perkeretaapian
- 7) Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan telekomunikasi terdiri dari:

- a. Seksi perhubungan udara
 - b. Seksi pos
 - c. Seksi telekomunikasi
- 8) Sub Dinas Pengendalian Operasional
- a. Seksi pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan
 - b. Seksi pengendalian operasional perhubungan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) dan kereta api
 - c. Seksi pengendalian operasioanal perhubungan udara, pos dan telekomunikasi
 - d. Seksi penyuluhan
- 9) Cabang Dinas terdiri dari:
- a. Kepala cabang dinas
 - b. Unsur staf/ petugas administrasi
 - c. Kelompok jabatan fungsional
 - d. Unsur lini/ petugas teknis operasional
- 10) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari:
- a. Kepala
 - b. Unsur staf/ petugas administrasi
 - c. Unsur lini/ petugas teknis operasional
 - d. Kelompok jabatan fungsional
- 11) Kelompok jabatan fungsional.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Kota Palembang



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palembang 2012

b. Pembagian Tugas

1) Kepala Dinas

Bertugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lalu lintas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palembang (Walikota).

Kepala dinas mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang perhubungan dengan kebijakan yang digariskan oleh kepala daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.
- b) Memimpin kegiatan dan urusan wakil kepala dinas, kepala bagian tata usaha dan kepala-kepala sub dinas yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- c) Merumuskan kebijaksanaan operasioanal pembangunan daerah dibidang pasar.
- d) Melaksanakan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta.
- e) Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan unsure-unsur pemerintah daerah dan instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.
- f) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala daerah.
- g) Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2) Wakil Kepala Dinas

Membantu tugas-tugas kepala dinas membuat program kerja dinas perhubungan jangka pendek, menengah, jangka panjang, memberikan saran/pertimbangan kepada kepala dinas mengenai langkah-langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang dan tugasnya. Menjalankan tugas dan fungsi kepada dinas sehari-hari apabila kepala dinas berhalangan dan berada diluar daerah atau luar kota. Wakil kepada dinas mempunyai fungsi:

- a) Membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
- b) Mengkoordinir bagian tata usaha, sub dinas, cabang dinas, unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas tersebut
- c) Memberikan saran atau pertimbangan kepada kepala dinas mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
- d) Menjalankan tugas dan fungsi kepala dinas sehari-hari apabila kepala dinas berhalangan atau berada diluar daerah berdasarkan surat petunjuk kepala daerah.
- e) Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

3) Bagian Tata Usaha

Bertugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, surat menyurat dinas, protocol, pembuatan laporan dinas serta hubungan masyarakat. Bagian tata usaha mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- b) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi hukum dan humas
- d) Melaksanakan ketatausahaan dan kearsipan

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a) Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas mengurus surat menyurat dan mengelola arsip

- b) Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai fungsi melakukan pengelolaan urusan kepegawaian

- c) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

- 4) Sub Dinas Program

Melaksanakan pengelolaan keuangan kebutuhan dinas atau kantor. Untuk menyelenggarakan tugasnya sub dinas program mempunyai fungsi:

- a) Menyiapkan bahan pengumpulan pengelolaan data
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja dibidang perhubungan
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- d) Menyiapkan bahan pelaksana evaluasi pelaporan kegiatan dan mengelola retribusi dibidang perhubungan.

Sub Dinas Program terdiri dari:

a) Seksi penyusunan rencana dan program

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan rencana program kegiatan bidang perhubungan.

b) Seksi pemantauan dan pengendalian

Mempunyai tugas melaksanakan pemantauan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan dibidang perhungan.

c) Seksi evaluasi pelaporan dan retribusi

Mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan serta kegiatan retribusi yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan.

5) Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sub dinas lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai tugaas melaksanakan perencanaan, pengawasan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas, manajemen angkutan, prasarana serrta keselamatan dan teknik sarana.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, sub dinas lalu lintas dan angkutan jlan mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

b) Menyusun rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.

- c) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana lalu lintas dan angkutan jasa.
- d) Menyusun rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari:

a) Seksi Lalu Lintas

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

b) Seksi Angkutan

Mempunyai tugas bahan pemberian izin dan penetapan trayek angkutan jalan, pengendalian angkutan, perumusan kebijakan angkutan dan bahan pembinaan pelaksanaan angkutan.

c) Seksi Prasarana

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan penetapan dan penyediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta bahan pemantauan dan analisis prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

d) Seksi Teknik Sarana

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan inventaris, pembinaan pembengkalan umum, penataan izin pendirian bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum, serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan ketentuan teknis dan lain jalan kendaraan.

6) Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP) dan Kereta Api.

Sub dinas perhubungan laut, angkutan sungai dan penyeberangan (ASDP) dan kereta api mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pembinaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perhubungan laut, lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan (ASDP) dan kereta api.

Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau penyeberangan dan Kereta Api.

a) Seksi Perhubungan Laut

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan lalu lintas angkutan laut, penyediaan dan pembangunan prasarana perhubungan laut dan memantau serta mengevaluasi kegiatan pelabuhan laut.

b) Seksi Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan lalu lintas angkutan sungai, danau, penyeberangan dan memantau serta mengevaluasi kegiatan di pelabuhan penyeberangan.

c) Seksi Pengkretaapian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaa, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan lalu lintas jalan rel dan memantau serta mengevaluasi kegiatan di stasiun kerta api.

7) Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi.

Sub dinas perhubungan udara, pos dan telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan pembinaan pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan penerbangan pos dan telekomunikasi.

Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi terdiri dari:

a) Seksi Perhubungan Udara

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam Bandar Udara dan pemberian izin lokasi Bandar udara serta melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi penerbitan IMB bagi bangunan dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) serta pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan angkutan udara.

b) Seksi Pos

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli, izin jasa titipan dan bahan pembinaan kegiatan usaha jasa pos.

c) Seksi Telekomunikasi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan izin penyelenggaraan instalasi, kabel rumah (IKRG), pengujian alat komunikasi dan bahan pembinaan kegiatan jasa usaha telekomunikasi.

8) Sub Dinas Pengendalian Operasional

Sub dinas pengendalian operasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai dan penyeberangan (ASDP), angkutan jalan rel, angkutan udara, pos dan telekomunikasi serta menyiapkan bimbingan keselamatan dan penertiban pada sector perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, sub dinas pengendalian operasional mempunyai fungsi:

Sub Dinas Pengendalian Operasioanal terdiri dari:

a) Seksi pengendalian operasioanal lalu lintas dan angkutan jalan.

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan jalan.

b) Seksi pengendalian operasional perhubungan laut, angkutan sungai dan penyeberangan (ASDP) dan kereta api.

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai dan penyeberangan (ASDP) dan kereta api.

c) Seksi pengendalian operasional perhubungan udara, pos dan telekomunikasi.

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan udara serta kelancaran pelaksanaan kegiatan pos dan telekomunikasi.

d) Seksi Penyuluhan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di bidang perhubungan.

9) Cabang Dinas

Cabang dinas merupakan unsure pelaksanaan teknis operasional dinas. Cabang dinas dipimpin oleh seorang kepala cabang dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Untuk menyelenggarakan tugasnya cabang dinas mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakn unsur teknis operasioanal
- b) Melaksanaakn urusan operasioanal

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari:

- a) Kepala cabang dinas
- b) Unsur staf/petugas administrasi
- c) Unsur lini/petugas teknis operasioanal
- d) Kelompok jabatan fungsional

10) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit pelaksanaan teknis dinas lalu lintas dan angkutan jalan kota Palembang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di satu atau beberapa wilayah kecamatan dan satu daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, unit pelaksana teknis dinas mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan sebagai tugas dinas sesuai dengan bidangnya
- b) Pelaksanaan urusan administrasi

Susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas terdiri dari:

- a) Kepala dinas
- b) Unsur staf/petugas teknis operasional
- c) Unsur lini/petugas teknis operasional

11) Kelompok Jabatan Fungsioanal

- a) Kelompok jabatan fungsioanal di dalam lingkungan Dinas Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dinas sesuai dengan keahlian masing-masing.
- b) Kelompok jabatan fungsioanal dapat ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- c) Jumlah tenaga fungsional di tentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- d) Pembinaan terhadap tenaga fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- e) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sebagai ketua kelompok yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada kepala dinas dan kepada unit pelaksana teknis dinas yang bersangkutan

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengawasan Penerimaan Retribusi Terminal yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Pengawasan merupakan salah satu tingkat manajemen yang meliputi kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pemantauan serta kunjungan staf untuk menjaga agar tugas pokok dan fungsi departemen dapat dilaksanakan dengan berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan sehingga kegiatan dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan atau kalau perlu menyelesaikan kembali rencana yang telah dibuat, dengan demikian pengawasan menyangkut masalah pengaturan berbagai kegiatan sesuai dasar analisis dari tujuan organisasi yang fundamental.

Pengawasan membantu menilai apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia dan pengarahan telah dilaksanakan dengan efektif. Pengawasan akan berjalan dengan baik apabila didahului dengan melakukan perencanaan dengan tolak ukur untuk merancang pengawasan yang akan digunakan sebagai standar.

Untuk menganalisa pengawasan penerimaan retribusi terminal yang dilaksanakan dinas perhubungan kota Palembang penulis menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut:

a. Menciptakan Standar

Untuk melakukan pengawasan yang maksimal terhadap kegiatan yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota Palembang, maka perlu ditetapkan standar sebagai acuan terhadap kegiatan yang dilakukan dengan cara menentukan anggaran.

Tabel IV.1
Target Retribusi Terminal
Tahun 2006-2010

Tahun	Anggaran
2006	Rp. 2.000.000.000
2007	Rp. 2.000.000.000
2008	Rp. 2.250.000.000
2009	Rp. 2.500.000.000
2010	Rp. 2.500.000.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang,2011

b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Langkah selanjutnya dalam pengawasan retribusi terminal adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Dinas perhubungan mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh karyawan. Dalam pelaksanaan pengawasan penerimaan retribusi terminal yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan kota Palembang adalah pengawasan tidak langsung dilakukan dengan laporan tertulis dan laporan lisan.

c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Tindakan selanjutnya dalam pengawasan retribusi terminal adalah pengukuran pelaksanaan kegiatan. Dinas perhubungan kota Palembang dalam melakukan pengawasan dilakukan dari luar bukan secara langsung, tetapi melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh bawahannya, laporan ini berbentuk laporan tulisan dan lisan. Dinas perhubungan juga melakukan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan ketertiban lalu lintas sehingga terwujud terkendalinya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan

Langkah selanjutnya dalam pengawasan retribusi terminal adalah perbandingan kegiatan dengan standar yang dapat dilihat dari Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal selama periode tahun 2006-2010. Dimana persentase realisasi penerimaan retribusi terminal untuk tahun 2006 adalah sebesar 70, 29% kemudian turun menjadi 60, 73% pada tahun 2007, sedangkan realisasi penerimaan retribusi terminal untuk tahun 2008 kembali mengalami penurunan menjadi 55, 09%, penurunan realisasi penerimaan tersebut terjadi karena beberapa factor antara lain, banyaknya angkutan kota, AKDP dan AKAP yang tidak masuk kedalam terminal dan petugas yang berjaga masih lengah dalam mengawasi mobi-mobil yang menurunkan dan menaikan penumpang diluar terminal, serta banyak terdapat sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya dimanfaatkan di terminal, sehingga hal tersebut dapat mengurangi tingkat pencapaian target. dan pada tahun 2009 dengan realisasi

penerimaan retribusi terminal sebesar 55,16% dan selanjutnya pada tahun 2010 realisasi penerimaan retribusi terminal mengalami peningkatan menjadi sebesar 56,53%.

e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tindakan yang terakhir dalam pengawasan penerimaan retribusi terminal adalah pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan belum maksimal karena persentase penerimaan retribusi terminal selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 selalu tidak tercapai. Untuk dapat memaksimalkan penerimaan retribusi terminal, sebaiknya dinas perhubungan kota Palembang memperketat pengawasan, melakukan koreksi serta memberikan tindakan tegas dan sanksi kepada kinerja UPTD / penertipan terminal yang melakukan penyelewengan, melakukan koordinasi bidang-bidang yang terkait dalam terminal sehingga terjadinya pengawasan melekat.

Berdasarkan analisis yang dilakukan sebelumnya mengenai pengawasan penerimaan retribusi terminal yang dilaksanakan dinas perhubungan kota Palembang melalui 5 indikator yaitu: penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, koreksi bila diperlukan, maka diketahui dinas perhubungan kota Palembang telah melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, tetapi pada pelaksanaannya dilapangan masih ada oknum-oknum yang dalam pelaksanaannya tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sehingga penerimaan retribusi terminal kurang maksimal.

2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah

Sebagaimana yang telah dibahas pada Bab II, mengenai upaya-upaya meningkatkan retribusi terminal terhadap penerimaan retribusi daerah Kota Palembang melalui prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah penulis uraikan secara terperinci.

Sesuai dengan yang telah diuraikan dalam Bab II mengenai Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan prosedur mengenai retribusi daerah, pertama akan dianalisis apakah pengawasan retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Palembang telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada, dan kemudian apabila ada penyimpangan akan disesuaikan dengan teori-teori mengenai pelaksanaan peraturan pemerintah tentang retribusi terminal.

Guna meningkatkan penerimaan retribusi terminal upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

a. Kemampuan sumber daya harus ditingkatkan

Permasalahan yang dihadapi oleh dinas perhubungan kota Palembang mengenai program kegiatan pembinaan adalah kurangnya pembinaan pada seluruh staf karyawan dimana program pelatihan dilakukan oleh dinas perhubungan hanya dilakukan setahun sekali, itupun hanya dilakukan bagi karyawan yang telah memiliki jabatan yang penting saja atau berprestasi saja,

khususnya pada bagian teknis saja, sedangkan bagi staf lainnya jarang sekali ditetapkan.

Berdasarkan pengamatan penulis seharusnya pihak dinas perhubungan harus melatih seluruh staf karyawan pada semua bidang (tanpa terkecuali) agar skill dan kualitas dari karyawan pada dinas perhubungan kota Palembang benar-benar bermutu, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka akan dapat meningkatkan juga pendapatan retribusi yang direalisasikan oleh pihak pemerintah.

b. Koordinasi antar karyawan dan instansi terkait dikembangkan

Pengkoordinasian antar karyawan dan instansi sangat penting yang harus dilakukan oleh dinas perhubungan kota Palembang. Hubungan antar karyawan dengan karyawan sangat berpengaruh pada kinerja kerja. Dinas perhubungan perlu meningkatkan pengawasan terhadap karyawan terutama dalam hal kedisiplinan dan membangun kerja sama yang erat antar karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Peranan polisi lalu lintas juga sangat penting karena merupakan sebuah lembaga formal, yang misi untuk mensosialisasikan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan kepada para pengemudi angkutan agar mengetahui peraturan dan tata tertib berlalu lintas di jalan. Polisi berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak, agar terciptanya warga negara khususnya pengemudi angkutan yang baik yang sadar dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Pihak kepolisian juga melakukan razia atau operasi secara rutin dan menindak pelanggaran dengan ditilang agar pengemudi jera. Pihak perhubungan

juga harus lebih dapat meningkatkan pengkoordinasian antara wajib retribusi maupun aparat yang bertugas dilapangan.

c. Kualitas pelayanan harus diperbaiki

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal pihak Dinas Perhubungan harus selalu mengevaluasi system pelayanan pemungutan yang ada. Pemungutan retribusi terminal dilakukan dengan menggunakan karcis yang mana setiap mobil angkutan masuk ke terminal akan diberikan karcis dan dicatat. Namun semua itu belum berjalan dengan baik, karena petugas yang berjaga masih ada yang lengah dalam mengawasi mobil-mobil yang menurunkan dan menaikkan penumpang diluar terminal, sering terjadi perkelahian antar preman-preman dengan para pedagang, sehingga para pedagang tidak mau membayar saat petugas menagih retribusi karena mereka tidak merasa aman, dan banyaknya penjual tiket diluar terminal. Minimnya tingkat pelayanan di terminal baik dari pelayanan jasa maupun fasilitas-fasilitas sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar retribusi karena mereka tidak merasakan kepuasan dari pelayanan yang ada di terminal.

Menurut peneliti solusi yang baik adalah perlu ditambah lagi personil untuk mengawasi angkutan-angkutan umum yang tidak masuk terminal. Petugas harus menertibkan dan dapat mengamankan kerusuhan didalam terminal dan pelayanan lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pemakai fasilita-fasiltas yang ada di terminal.

d. Penggalian sumber-sumber baru

Untuk meningkatkan penerimaan retribusi terminal dinas perhubungan kota Palembang harus mencari berbagai sumber-sumber baru yang dapat meningkatkan penerimaan retribusi terminal seperti membuka terminal baru.

Tabel IV.2

Data Terminal di Kota Palembang

No	Nama Terminal	Tipe	Luas	Instansi Pengelola
1.	Alang- alang Lebar	A	8.000	Dinas Perhubungan Palembang
2.	Karya Jaya	A	18.000	Dinas Perhubungan Palembang
3.	Jaka Baring	B	8.000	Dinas Perhubungan Palembang
4.	Plaju	B	3.750	Dinas Perhubungan Palembang
5.	Sako Kenten	C	2.400	Dinas Perhubungan Palembang
6.	Lemabang	C	1.600	Dinas Perhubungan Palembang
7.	Km . 5	C	1.800	Dinas Perhubungan Palembang
8.	7 ulu	C	820	Dinas Perhubungan Palembang
9.	Tangga Buntung	C	780	Dinas Perhubungan Palembang

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang,2011

e. Pembuatan peraturan-peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan

Kesadaran masyarakat merupakan hal terpenting dalam melaksanakan peraturan yang lebih ditetapkan oleh pemerintah. Jika keseluruhan masyarakat baik tentunya penerimaan retribusi daerah pun akan berjalan dengan baik. Akan tetapi pemerintah juga harus memperhatikan keadaan perkembangan daerah untuk itu dalam upaya peningkatan pendapatan retribusi daerah dinas perhubungan harus melakukan sosialisasi peraturan-peraturan yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah kepada wajib retribusi berdasarkan peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil pembahasan terhadap permasalahan dalam skripsi ini, akan di uraikan kesimpulan mengenai keadaan dan hasil pembahassan Pengawasan Penerimaan Retribusi Terminal dan Kontribusinya Dalam Usaha Meningkatkan Retribusi Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang dan beberapa saran yang dianggap perlu sebagai usulan perbaikan atau masukan untuk kepentingan dinas perhubungan kota Palembang guna menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah di kota Palembang.

A. Simpulan

1. Pengawasan penerimaan retribusi terminal yang dilaksanakan dinas perhubungan kota Palembang melalui 5 indikator yaitu: penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan serta pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan, maka dapat diketahui dinas perhubungan kota Palembang telah melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, tetapi pada pelaksanaannya dilapangan masih ada oknum-oknum yang dalam pelaksanaannya tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sehingga penerimaan retribusi terminal kurang maksimal.



2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan retribusi terminal. Di dalam meningkatkan pendapatan retribusi daerah, Dinas Perhubungan Kota Palembang lebih mengutamakan kinerja para petugas yang bersangkutan untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah. Untuk melakukan pelaksanaan pemungutan retribusi terminal pihak dinas perhubungan harus lebih memberikan pelayanan yang lebih baik agar para wajib retribusi merasakan kepuasan. Untuk meningkatkan pendapatan retribusi terminal dinas perhubungan kota Palembang melakukan penelitian mengenai sumber-sumber yang ada, yang dapat dijadikan bahan untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah. Dalam melaksanakan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah hendaknya wajib retribusi memiliki kesadaran untuk menaati peraturan yang telah dibuat. Akan tetapi, pemerintah juga harus melihat keadaan perekonomian tiap daerah.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis akan memberikan saran yang mungkin akan bermanfaat bagi dinas perhubungan kota Palembang guna menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah di kota Palembang. Adapun saran yang akan penulis berikan adalah hendaknya dinas perhubungan kota Palembang terus meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan retribusi terminal dan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum-oknum yang melakukan penyelewengan baik itu kepada petugas pendataan maupun pemungutan retribusi. Dan diharapkan pada dinas perhubungan kota

Palembang dapat meningkatkan sumber daya yang ada agar lebih berkualitas sehingga dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerah. Dan dengan adanya sumber-sumber potensi baru maka diharapkan dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

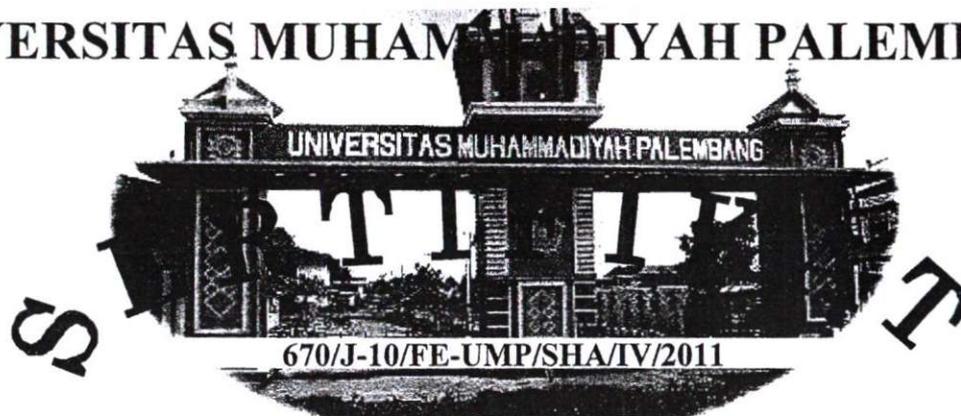
- Abdul. Halim. 2002. **Manajemen Keuangan Publik**, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- T Hani Handoko. 2000. **Manajemen dan Aplikasinya**, Penerbit Ganesha, Bandung
- Malayu Hasibuan S.P .2001. **Prinsip Dasar Manajemen**, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Heidjrachman Ranupandojo dan Suad Husnan. 2000. **Manajemen Pesonalia**. Edisi Ketiga. Penebit BPFE. Yogyakarta.
- Indra Bastian dan Gatot Supriyanto. 2003. **Sistem Akuntansi Sektor Publik**. Salemba Empat. Jakarta
- Kamus Umum Bahasa Indonesia. 2002, Penerbit M2S, Bandung
- Kunarjo.2004. **Pembiayaan Pemerintah**, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Nan Lin ahli bahasa W. Gulo.2002. **Metode Penelitian Bisnis**. Yogyakarta
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. **Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen**. Edisi Pertama, BPFE. Yogyakarta
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 **Tentang Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Tranportasi**
- Revrisond Baswir. 2000. **Akuntansi Pemerinta Indonesia**. BPFE. Yogyakarta
- Sugiyono. 2010. **Metodologi Penelitian Bisnis**. CV.Alfabeta. Bandung
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 **Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**
- Yayat M Herujito. 2001. **Dasar-Dasar Manajemen**, Grasindo, Jakarta

Skripsi :

- Elis Sulitiawati. 2006. Analisis Pelaksanaan Prosedur Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Palembang pada DINas Kesehatan Kota Palembang. Skripsi. FE UMP. Palembang. (tidak dipublikasikan)**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

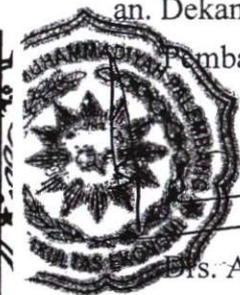
NAMA : RENIA AMELIA
NIM : 222008063
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 20 April 2011

an. Dekan
Pembantu Dekan IV



Drs. Antoni



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0711) 441175 Faksimile : (0711) 442547 Kode Pos 30146

E-mail : dishub_palembang@yahoo.co.id, Website : www.dishub.palembang.go.id

Palembang, 14 Februari 2012

Nomor : 553/157 /DISHUB/2012
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Selesai Penelitian

Kepada
Yth. Kepala BKBPPM Kota Plg
di -
Palembang

Sehubungan dengan surat Kepala BKBPPM Kota Palembang Nomor :
070/1038/BAN.KBPM/2011 tanggal 16 November 2011 perihal Permohonan
Izin Pengambilan Data dengan ini dilaporkan bahwa :

Nama : RENIA AMALIA
Nim : 22 2008 063
Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik

Dinyatakan telah selesai melaksanakan penelitian pada Dinas
Perhubungan Kota Palembang.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
BINTU
PEMINTA PALEMBANG
BIKAS
PERHUBUNGAN
H. MASRIN HM. TOYIB, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590213 198003 1 002



ECONOMICS FACULTY
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER
 Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang
 Telp. 0711.511433
 e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME	TIME TAKEN
RENIA AMELIA	08.00-10.00 AM

SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D / M / Y	D / M / Y
F	10-Jul-1990	29-Jan-2012

TOEFL PREDICTION SCORES			
SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
46	39	43	427

EXAMINEE'S NUMBER
1248


Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd.

DATE OF REPORT
07/02/2012


Muhammad Farim, S.E., M.Si
 CHAIRMAN

Consultant

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This score is valid for only six months. This report is confidential



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN	IZIN PENYELENGGARAAN	AKREDITASI
KEHIMPUNAN MAHASISWA EKONOMI	N. 0619/DITK/0001	NO. 01/SAN/PTK/0001/2008
BIDANG AKUNTANSI	NO. 002/DITK/0001	NO. 01/SAN/PTK/0001/2008
WALAFINEH (ETAWAKEL) 08	NO. 007/DITK/0001	NO. 01/SAN/PTK/0001/2008

Alamat: Jalan Jendral Sudirman 177, 1. UL. 30711 Palembang, Sumatera Selatan. Telp. (0711) 511433 Faximbe (0711) 511434

(Faint signature)

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Rabu, 29 Februari 2012
 Waktu : 08.00 Wib s.d Selesai
 Nama : Renia Amelia
 NIM : 22 2008 063
 Program Studi : Akuntansi
 Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
 Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Penerimaan Retribusi Terminal dan Kontribusinya dalam Usaha Meningkatkan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Palembang

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI SEHINGGA DIPERKENANKAN UNTUK MENDAFTAR WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Pembimbing	16-3-2012	<i>(Signature)</i>
2	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Ketua Penguji	10-3-2012	<i>(Signature)</i>
3	Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si	Anggota Penguji I	10/3/2012	<i>(Signature)</i>
4	Muhammad Fahmi, S.E, M.Si	Anggota Penguji II	10/3/2012	<i>(Signature)</i>

Palembang, Maret 2012
 An. Dekan
 Ketua Program Studi Akuntansi

(Signature)

Drs. Sunardi, S.E, M.Si
NIDN : 0206046303

BIODATA

Nama : Renia Amelia

Tempat Tanggal lahir : Langkan, 10 juli 1990

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jln.Palembang-Betung Km 35. Langkan BA III

Telpon : 085380004093

Nama Orang Tua

1. Ayah : Abdul Majid

2. Ibu : Yahuna

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : wiraswasta

2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Jln. Palembang-Betung Km 35. Langkan BA III

Palembang.....2012

Penulis



Renia Amelia